



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DWI ENDAH PRASETYOWATI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 632855

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.101.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m²/120 m² di JEMBER, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 137.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 193 m²/120 m² di JEMBER, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 208.000.000
3. Tanah Seluas 1696 m² di JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 267.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 2054 m²/360 m² di JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 317.000.000
5. Tanah Seluas 1802 m² di JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 272.000.000
6. Tanah Seluas 2121 m² di JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
7. Tanah Seluas 84 m² di JEMBER, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 265.000.000
8. Tanah Seluas 1510 m² di JEMBER, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 365.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 306.200.000

1. LAINNYA, TRAIL POLIGON SEPEDA GUNUNG Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000
2. MOBIL, AVANZA MINIBUS Tahun 2012, HIBAH TANPA AKTA Rp. 95.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000



| | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 9.100.000 |
| D. SURAT BERTHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 2.550.000 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | 19.000.000 |
| Sub Total | Rp. | 2.437.850.000 |
| III. HUTANG | Rp. | 175.000.000 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 2.262.850.000 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.